

Daftar Pustaka

Buku

- Adjie, Habib. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Asshiddiqie, Jimmly, *Green constitution: Nuansa hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- _____, *Konstitusi ekonomi*, Kompas, Jakarta, 2010.
- _____, *Konstitusi agraria: Konstitusi tanah & air*, Dalam kata pengantar buku Arizona, Y., *Konstitusionalisme Agraria*. STPN Press, Yogyakarta, 2014.
- Arizona, Y., *Konstitusionalisme agrarian*, STPN Press, Yogyakarta, 2014.
- Chomzah, Ali Achmad, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Hadjon, Philipus M, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesia Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.
- Hager, L. Michael, *The Rule of Law in Developing Countries*, dalam B.F. Sihombing. *Evolusi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 2004.
- Handayani, Sri Wahyu. *Hukum Agraria di Indonesia*. Penerbit Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto. 2022.
- Harsono, Boedi. *Hukum agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Djambatan. Jakarta. 1997.
- _____. *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya)*. Jilid 2, Djambatan. Jakarta. 2008.
- Hutagalung, A.S., et.al. (2012). *Hukum pertanahan di Belanda & Indonesia*. Bali: Pustaka Larasan. Denpasar. 2012.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.
- Mertoskusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta: 1988.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Mujiburohman, D. A., *Penegakan Hukum Penertiban & Pendayagunaan Tanah Terlantar*, STPN Press, Yogyakarta, 2019.
- Parlindungan, A.P.. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Mandar Maju, Bandung. 1990.
- _____, *Komentar Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung. 1993.
- _____. *Berakhirnya hak-hak atas tanah menurut sistem Undang-Undang Pokok Agraria*. CV Mandar Maju. Bandung. 2001.
- Poerbopranoto, Koentjoro, *Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia*. Bina Cipta, Bandung, 1981.
- Puspa, Van Pramodya, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.
- Santoso, Urip. *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2011.
- Satrio, J., *Hukum Perikatan, perikatan yang lahir dari perjanjian buku II*, 1999.
- Sihombing, B.F. *Konversi Hak Atas Tanah Barat*. Kencana. Jakarta. 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002.
- Soimin, Soedharyo. *Status Hak dan Pembebasan Tanah*. Sinar Grafika. Jakarta, 2004.
- Sumarja, F.X.. *Hak atas tanah bagi orang asing: Tinjauan politik hukum & perlindungan warga negara Indonesia*. STPN Press. Yogyakarta. 2015.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Sutedi, Adrian. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Sinar Grafika: Jakarta, 2014.

- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta. 2010.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Wakhid, Nur. *Hukum Perjanjian Syarat Sah Perjanjian*. Diklat Buku Ajar Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto. 2008.

Jurnal

- Damayanti, Dwi Aprilia Arum, dkk. *Perjanjian Jual Beli Tanah yang Tidak Dilakukan Di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*. Lex Privatum, Vol.VIII, No.2. 2020. hlm.17
- Erwiningsih, W.. "Pelaksanaan pengaturan Hak Menguasai Negara Atas Tanah Menurut UUD 1945". *Jurnal Hukum*. Edisi Khusus. 2009. hlm 118-136.
- Hasanah, Ulfia, "Status Kepemilikan Tanah Hasil Konversi Hak Barat Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volumen 2 No. 2 Februari 2012. hlm. 201
- Idleman, Scott C., "A Prudential Theory of Judicial Candor", *Faculty Publication of Marquette University Law School*, Paper 181, terjemahan bebas oleh Penulis, 2005. hlm. 1320.
- Kunu, Andi Bustamin Daeng. Kedudukan Hak Menguasai Negara Atas Tanah. *Fiat Justitia Ilmu Hukum Volume 6 NO.1*. 2012. hlm. 1
- Kusumadara, A., "Perkembangan Hak Negara Atas Tanah: Hak Menguasai atau Hak Memiliki?". *Jurnal Media Hukum*, 20(2). 2013. hlm. 262-276.
- Mujiburohman, Dian Aries. Legalisasi Tanah-Tanah Bekas Hak Eigendom Kajian Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Pkl. *Jurnal Yudisial Volume 14 Nomor 1*. 2021. hlm. 117-137
- Safitri, M. A.. "Hak Menguasai Negara di Kawasan Hutan Beberapa Indikator Menilai Pelaksanaannya". *Jurnal Hukum Lingkungan*, 1(2). 2014. hlm. 1-21

Santoso, U.. "Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional".

Mimbar Hukum, 24(2). 2012. hlm. 275-288

Saragih, Feri Evandani, Suyud Margono, Lasbok Marbun. "Penyelesaian Sengketa Terhadap Kepemilikan Tanah Bersertifikat Ganda Di Badan Pertanahan Nasional Wilayah Jakarta Timur (Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 146/G/2018/PTUN JKT)". *Yure Humano*. Vol. 6 No. 1. 2022. hlm. 86

Sibuea, Harris Yonatan Parmahan. "Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama kali". *NEGARA HUKUM* Vol. 2 No. 2. November 2011. hlm. 294

Thesis

Fairuz Syifa Arifin, *Pembaruan Agraria Nasional (PAN) Dengan Program Sertifikasi Tanah Melalui Prosa Guna Menyukkseskan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Pemalang*, Tesis, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, Semarang. 2008

Putusan

Putusan Nomor 454/Pdt/G/2016/PN.Bdg;

Putusan Tingkat Banding Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG;

Putusan Kasasi Nomor 934 K/Pdt/2019;

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 109 PK/Pdt/2022;

Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

bagian kedua dari UUPA tentang ketentuan-ketentuan konversi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-
Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah
Asal Konversi Hak-Hak Barat

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak
Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah

Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor 21 Tahun 1994 tentang Tata Cara
Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1979
tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian
Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas
Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-
Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru atas Tanah
Asal Konversi Hak-Hak Barat.

RIDE No. 5/1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Tata Cara Permohonan hak
atas tanah dan peraturan pelengkap.

Internet

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keabsahan> diakses pada tanggal 16 Oktober
2024

Ernanto Arisandi. *Asas Tunai dan Terang Dalam Jual Beli Tanah*,
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/> diakses pada tanggal 23 Mei 2025

Erza Putri. Peran PPAT Dalam Peralihan Hak Atas Tanah,
<http://erzaputri.blogspot.com> diakses pada tanggal 23 Mei 2025